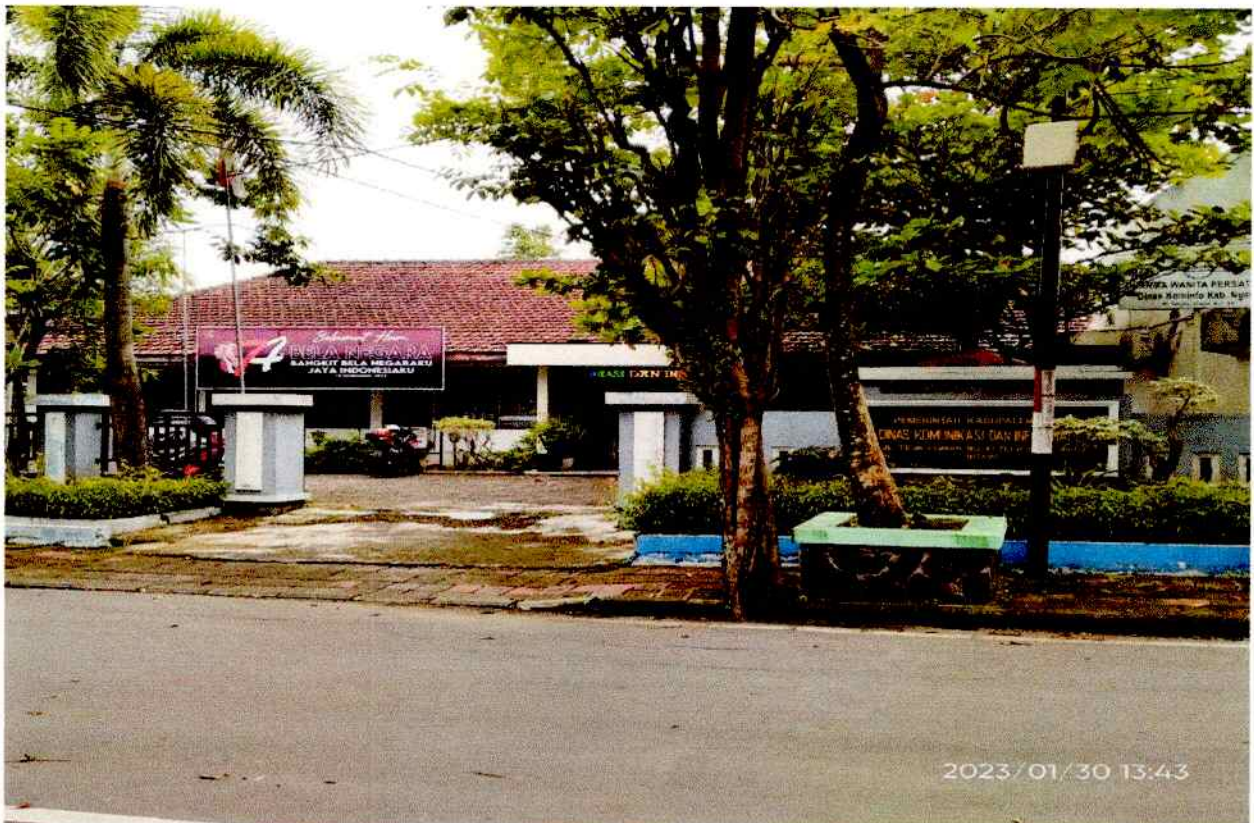




**L A P O R A N
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023**



**DISUSUN OLEH :
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4-5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	6-7
A. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan	8-10
B. Struktur Organisasi	10-12
1.2. Sumber Daya	13
A. Data Pegawai	13
B. Sarana dan Prasarana	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategi	15
A. Visi	15
B. Misi	15
C. Analisa Swot dan CSF	16-17
D. Tujuan	18
E. Sasaran	18
F. Indikator Kinerja Utama	18
G. Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	24
A. Sasaran Tahun Bersangkutan Yang Ingin Dicapai	24
B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27-28
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	39-41
LAMPIRAN -LAMPIRAN.....	42-88

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023 memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman evaluasi bagi seluruh staf dan pejabat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai saran yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ngawi, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Ngawi



WAIYU SRI KUNCORO, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750122 199493 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada public atas pencapaian kinerja utama, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2023. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat evaluasi terhadap target dan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi termasuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Ngawi sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam tahun 2023 sebagaimana tertuang visi dan misi Kabupaten Ngawi maka Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi sesuai dengan kewenangan yang ada, mewujudkan keterkaitan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi tercantum dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasar Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- 2) Peningkatan implemantasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerinthan dan pelayanan publik;
- 3) Peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematik;
- 4) Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 5) Perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 6) Pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, pengelofaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- 7) Pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- 8) Pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
- 9) Pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
- 10) Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan komunikas,i informatika, statistik dan persandian;
- 11)Pelaksanaan pembinaan, bimbingan tehnis dan supervisi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 12)Pengordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 13)Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- 14) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai kewenangan:

- 1) Pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;
- 2) Pengelolaan komunikasi publik;
- 3) Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik Government Chief Information Officer, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- 4) Pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang terintegrasi;
- 5) Pengelolaan infrastruktur, data center, layanan pengembangan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- 6) Pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai walidata;
- 7) Pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;
- 8) Pengelolaan tata kelola persandian; dan
- 9) Pengelolaan keamanan informasi.

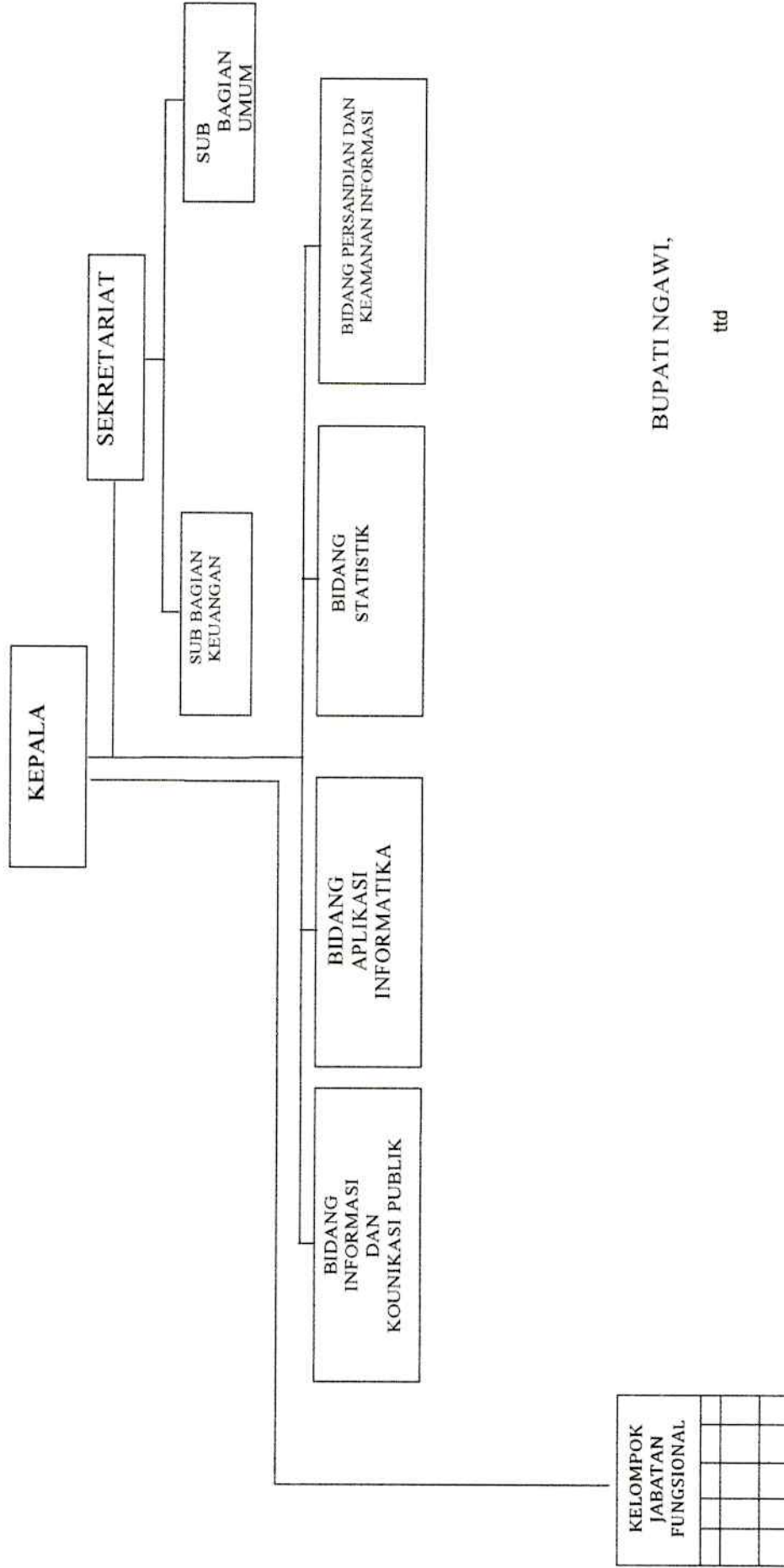
2. **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Kepala;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Statistik ;
- f. Bidang Persandian;dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

1. Data Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 56 orang PNS dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan :
 - Pegawai Golongan IV : 7 Orang
 - Pegawai Golongan III : 33 Orang
 - Pegawai Golongan II : 16 Orang
 - Pegawai Golongan I : 1 Orang
- 2) Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi :
 - Pejabat Eselon II/B : 1 Orang
 - Pejabat Eselon III/A : 1 Orang
 - Pejabat Eselon III/B : 4 Orang
 - Pejabat Eselon IV/A : 2 Orang
- 3) Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan :
 - Pasca Sarjana (S2) : 9 Orang
 - Sarjana (S1) : 35 Orang
 - Sarjana Muda : 6 Orang
 - SLTA : 6 Orang
 - SLTP : 1 Orang
- 4) Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Struktural :
 - SPAMEN / Diklatpim II : - Orang
 - SPAMA / Diklatpim III : - Orang

- PIM 3 : 2 Orang
 - PIM 4 : 10 Orang
- 5) Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Fungsional / Kursus :
- Bimtek Bendahara : 1 Orang
 - Bimtek SAKIP : 2 Orang
 - Pengadaan Barang dan Jasa : 1 Orang
 - Analis Kebutuhan Diklat : - Orang
 - Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja : 2 Orang
 - Diklat Sasaran Kinerja Pegawai : 2 Orang
 - Diklat Arsiparis : 1 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas ditunjang Sarana dan Prasarana sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Barang Inventaris

I. TANAH

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	LETAK/ALAMAT	LUAS (M2)	LUAS GEDUNG (M2)	KONDISI BANGUNAN	
					BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	
1	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	2.900			

II. BANGUNAN

NO URUT	NAMA BARANG/JENIS BARANG KODE BARANG REGISTER	LETAK/LOKASI ALAMAT	LUAS LANTAI (M2)	LUAS GEDUNG (M2)	KONDISI BANGUNAN	
					BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	0	6.210	√	-
2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	0	6.750	√	-
3	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	73.500	9.340	√	-
4	BANGUNAN GEDUNG	Jl. Teuku Umar	40.000	745	√	-

	KANTOR PERMANEN	No.43 Ngawi				
5	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Yos Sudarso No.65 Ngawi	113.855	9.340	√	-
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi	421	65	√	-
7	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	381.000	9.340	√	-
8	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Yos Sudarso Ngawi	0	6.750	√	-
9	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	340	6.210	√	-
10	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi		9.340	√	-

NO URUT	NAMA BARANG/JENIS	LETAK/LOKASI	LUAS LANTAI (M2)	LUAS GEDUNG (M2)	KONDISI BANGUNAN	
					BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	
1	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS SEDANG	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	-		-	√
2	SALURAN PEMBUANG AIR BUANGAN AIR HUJAN	Jl. Teuku Umar No.43 Ngawi	-		-	√

III. ALAT ANGKUTAN, MESIN DAN PERALATAN

NO URUT	NAMA BARANG	MERK	JUMLAH	MESIN	KONDISI BARANG	
					BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	
1			-		-	√
2			-		-	√

C. Aspek dan Isu Strategis

Aspek Strategis berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi adalah "Meningkatkan etas kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan primua . Sedangkan yang berkaitan dengan Renstra Dinas KomunikaIs. Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan meningkatnya implementasi

e - Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .

Sedangkan Isu Strategis Pelaksanaan Program Kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten gawi untuk menjalankan sasaran rencana strategis ditentukan beberapa isu strategis sebagai berikut :

- a. Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi
- b. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
- c. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memmmh dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Diseminasi informasi publik terkait dengan program pembangunan nasional melalui berbagai media.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan tingkungan strategi lokal, nasional, maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan atau sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah mutlak dilakukan. Oleh karena itu apa yang menjadi rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah tak lepas dari rencana Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan sasaran strategisnya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen perencanaan strategis setidaknya berisi sasaran, indikator dan program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

2.1 Perencanaan Strategis

A. Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing. berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

B. Misi Pemerintah Kabupaten Ngawi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mendukung misi sebagai berikut Misi ke - 3 yaitu :
"Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima"

Permasalahan peningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan

terkoordinasi namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah selaku leading sektor dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan, senantiasa menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang bisa lebih berpihak.

B. Analisa SWOT DAN CSF

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dengan menggunakan metode analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis menetapkan asumsi-asumsi analisis yang digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan ancaman kegagalan suatu program sebagai berikut:

i. Faktor-faktor Lingkungan

Metode analisis SWOT dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal.

1. Faktor Lingkungan Internal antara lain:

a. Kekuatan

- i. Tersedianya sumber daya alam dan manusia yang dapat mendukung program pengembangan komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- ii. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi;
- iii. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan
- iv. peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terutama terkait pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- v. Adanya penerbitan media cetak, dan media promosi daerah yang tersedia;
- vi. Tempat Penyiaran radio;
- vii. Adanya aplikasi untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;

- viii. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi;
- ix. Peran serta seluruh PD (Perangkat Daerah) dalam mengelola informasi.

b. Kelemahan

- i. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- ii. Belum optimalnya kinerja sumber daya manusianya dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- iii. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- iv. Belum maksimalnya Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
- v. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

2. Faktor Lingkungan Eksternal antara lain :

a. Peluang

- i. Dana APBD dan Anggaran lainnya;
- ii. Peran serta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mengelola informasi;
- iii. Memaksimalkan Proses Peningkatan Hubungan Masyarakat ;
- iv. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat

b. Ancaman/Tantangan

- i. Maraknya berita hoax;
- ii. Keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya terlaksana;

- iii. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan;
- iv. Perkembangan teknologi informasi

ii. Asumsi Analisis dan Pilihan Strategis

Kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampak terhadap masa depan organisasi, maka berdasarkan asumsi-asumsi untuk menjalankan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ditentukan pilihan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya implementasi e - Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

iii. Faktor Penentu Keberhasilan

Dari sejumlah pilihan strategis tersebut ditentukan faktor penentu keberhasilan yaitu :

1. Kepedulian pimpinan terhadap pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 4. Kebutuhan pengembangan SPBE;
 5. Tersedianya data statistik sektoral;
 6. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika;
 7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- iv. Faktor Ancaman / Kegagalan

Sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu:

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya;
6. Kesenjangan informasi di masyarakat.

C. Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan, rencana straregis tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

NO	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah; 2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

D. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya implemantasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

E. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi yang menjadi acuan untuk periode waktu Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 Kabupaten Ngawi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan layanan telekomunikasi • Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi • Indeks KAMI

Tabel 2.4
 Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		86.87	85	85.75	86.20	86.50	86.70	87.00
2.	Meningkatnya implementasi	Cakupan layanan	%	74	75	80	80	80	90	100

e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	telekomunikasi								
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	%	53	55	60	65	70	75	80
	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	%	53	55	5503				
	Indeks KAMI		-			300	301	303	305

F. Strategi dan arah kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 telah menetapkan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan/strategi yaitu : Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat. untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya

Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi diimplementasikan melalui 5 program yang didukung 12 kegiatan dan 56 sub kegiatan.

1. Program Prioritas :

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi, komunikasi publik dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik serta untuk melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebaran informasi, untuk diseminasi informasi dalam rangka memberikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui kegiatan dialog interaktif terkait pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi, reportase atau liputan berita yang diupload melalui media massa baik cetak, elektronik dan media sosial serta mengedukasi publik dan badan publik, mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik, peningkatan kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini bertujuan untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang transparan responsive dan berkelanjutan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dalam penyediaan layanan pemerintah. mempercepat dan memperluas layanan pemerintah serta mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis, untuk penyediaan infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di Pemkab Ngawi.

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan statistik sektoral sekaligus sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung satu data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk melindungi keamanan informasi milik pemerintah, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan nasional

2. Program Penunjang :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, memberikan pelayanan administrasi kantor dalam mewujudkan tertib administrasi, memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan, meningkatkan disiplin dan kapasitas

sumber daya aparatur yang ada di Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Ngawi.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

A. Sasaran Tahun Bersangkutan Yang Ingin Dicapai

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Oinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Ngawi Tahun 2021- 2026 yang telah disusun, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Ngawi telah menyusun target Rencana Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20
2.	Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	80
		Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65
		Indeks KAMI	300

B. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa

nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.558.768.271
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	80	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.175.578.000
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.845.759.732
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	181.788.000
	Indeks KAMI	301	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	181.788.985

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selaku pelaksana program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah, melaksanakan perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, pembinaan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi baik kegiatan yang bersifat administrative maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka melaksanakan program kerja pengembangan Komunikasi dan Informatika melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026,

sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	89.35	104%
Meningkatnya implementasi e-	Cakupan layanan telekomunikasi	80%	86%	107%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65%	88%	136%
	Indeks KAMI	300	300	100%

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan rencana strategis Dinas/ Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran : Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
 - a. Indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Target : 86.20, Realisasi : 89.35, Pencapaian 104%.
Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-1 = 104% dengan kategori Baik.
- 2) Sasaran: Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Indikator : Cakupan layanan telekomunikasi, Target : 80%, Realisasi : 86%, Pencapaian 107% .
- b. Indikator : Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi, Target : 65%, Realisasi : 88%, Pencapaian 136%.
- c. Indikator : Indeks KAMI, Target : 300, Realisasi 300, Pencapaian 100%.

Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-2=114% dengan kategori Baik.

Diharapkan pada tahun yang akan datang seluruh capaian masing - masing indikator dapat meningkat menjadi lebih baik.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan e-Government yang terintegrasi	100 %	25 %	45 %	70 %	90 %	100%
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat / Standar kepuasan masyarakat	75	72	62,24	63,10	76,15	76,15

Meningkatnya pemanfaatan IT oleh masyarakat.	Persentase KIM yang mengaplikasikan TIK dalam aktivitasnya	100 %	42,85 %	38,10 %	52,38 %	71,43 %	100%
--	--	-------	---------	---------	---------	---------	------

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi	
			2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	89.35	89.35
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	100 %	80%	86%
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	75	60%	88%
	Indeks KAMI	100 %	60%	300

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%) 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian sd 2023 terhadap 2023
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	89.35	87	104%
Meningkatnya implementasi e-Government	Cakupan layanan telekomunikasi	80%	86%	100%	107%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%) 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian sd 2023 terhadap 2023
1	2	3	4	5	
dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65%	88%	80%	136%
	Indeks KAMI	300	300	305	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)

- a) Percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dalam hal ini 4000 Base Transceiver Station (BTS) akan dibangun, khususnya untuk wilayah 'blankspot' di seluruh pelosok Indonesia.
- b) Rencana Pemerintah untuk membangun Pusat Integrated Data Center. Menurut Menteri Kominfo, Pusat Data Nasional Pemerintah itu ditargetkan operasional Tahun 2023. Pentingnya pengembangan inovasi dari dunia pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi di Tanah Air menjadi pusat penelitian untuk menghasilkan produk baru di dunia digital Indonesia.
- c) Pentingnya peran kegiatan diplomasi era teknologi digital dan revolusi industri 4.0.

Di tengah perkembangan teknologi digital, di era revolusi industri 4.0 para diplomat harus menjadi Diplomat Digital. Para diplomat dalam hal ini, tentunya memiliki peran penting dan menjadi stimulus untuk meyakinkan global technology company, bahwa Indonesia memiliki talents digital yang unggul. Pemerintah mengambil peran sebagai stimulus untuk mendorong semakin banyak lahirnya talenta digital Indonesia. Program Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut ;

1. Program Gerakan Nasional literasi Digital yang ditujukan bagi masyarakat umum;
2. Program ini di antaranya memberikan pelatihan dasar mengenai keterampilan digital;

3. Beasiswa pelatihan Digital Talent Scholarship. "Program Digital Talent Scholarship memberikan pendidikan bagi para mahasiswa dan sarjana perguruan tinggi untuk menjadi pekerja teknisi di bidang digital;
4. Program Digital Leadership Academy, yaitu memberikan pendidikan bagi para pejabat di sektor publik dan privat, termasuk dosen dan kepala dinas, untuk meningkatkan keterampilan digital.

Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian semua dalam rangka untuk mendukung program yang telah ditargetkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga ada kontribusi dari pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kinerja nasional. Konsentrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selama 3 tahun terakhir ini adalah pembangunan infrastruktur untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informatika, selain itu juga peningkatan pelayanan publik terkait informasi publik.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	89,35	104%	6,558,768,271	6.511.442.661	99.04
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.							
Meningkatnya implementasi e-Government dalam	Cakupan layanan telekomunikasi	80%	86%	107%	1.175.578.000	1.132.035.584	96.30

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
					1.845.759.732	1.828.431.583	99.06
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65%	88%	136%	181,788,000	176.915.340	97.32
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks KAMI	300	300	100%	181,788,985	174.844.480	96.18
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi							

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20	89.35	104%
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	80%	86%	107%
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	65%	88%	136%
	Indeks KAMI	300	300	100%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan
Program/Kegiatan Tahun 2023

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi 2023			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,943,682,988	98.21	9,823,669,648	98.64	120,013,340
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,580,106,003	98.21	9,471,909,828	98.64	108,196,175
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,558,768,271	99.42	6,511,442,661	99.04	47,325,610

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,928,000	100	24,928,000	100	0
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,080,000	100	4,080,000	100	0
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,215,000	100	1,215,000	100	0
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,215,000	100	1,215,000	100	0
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,705,000	100	4,705,000	100	0
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,705,000	100	4,705,000	100	0
6)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,008,000	100	9,008,000	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,715,912,671	99.67	5,670,804,166	99.21	45,108,505
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,703,697,671	99	5,658,589,166	99.21	45,108,505
8)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,110,000	100	5,110,000	100	0
9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,105,000	100	7,105,000	100	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,558,606	99.86	165,403,170	98.71	2,155,436
10)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,740,592	100	4,740,000	99.99	592
11)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,761,736	100	59,185,000	99.03	576,736
12)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,140,000	100	3,140,000	100	0
13)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,971,000	100	14,971,000	100	0
14)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	100	1,980,000	100	0
15)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,650,000	100	2,650,000	100	0

16)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,315,278	99	78,737,170	98.04	1,578,108
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,337,846	98.67	187,845,000	94.23	11,492,846
17)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,106,000	100	107,400,000	92.5	8,706,000
18)	Pengadaan Mebel	15,813,000	100	15,765,000	99.7	48,000
19)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,418,846	96	64,680,000	95.94	2,738,846
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,011,148	100	379,931,141	99.72	1,080,007
20)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235,216,148	100	234,139,641	99.54	1,076,507
21)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,800,000	100	64,800,000	100	0
22)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80,995,000	100	80,991,500	100	3,500
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,020,000	97.75	66,923,500	95.58	3,096,500
23)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,000,000	100	11,517,000	95.98	483,000
24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26,500,000	91	23,886,500	90.14	2,613,500
25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,520,000	100	21,520,000	100	0
26)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	100	10,000,000	100	0
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,175,578,000	96.1	1,132,035,584	96.3	43,542,416
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,175,578,000	96.1	1,132,035,584	96.3	43,542,416

27)	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13,880,000	96	13,610,600	96.16	269,400
28)	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20,248,000	90	20,202,000	85.94	46,000
29)	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	212,432,000	99	204,965,334	98.98	7,466,666
30)	Pelayanan Informasi Publik	45,082,000	98	43,907,580	98.06	1,174,420
31)	Layanan Hubungan Media	75,000,000	100	73,555,260	99.77	1,444,740
32)	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	161,160,000	97	140,381,210	96.49	20,778,790
33)	Manajemen Komunikasi Krisis	8,449,000	97	7,781,000	97.39	668,000
34)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	171,010,000	98	164,447,100	98.07	6,562,900
35)	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2,816,000	94	2,420,000	87.11	396,000
36)	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	465,501,000	92	460,765,500	92.09	4,735,500
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,845,759,732	98.82	1,828,431,583	99.06	17,328,149
8	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,387,440,024	99.5	1,379,850,725	99.45	7,589,299
37)	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,125,000	100	16,108,875	99.9	16,125
38)	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,371,315,024	99	1,363,741,850	99.45	7,573,174
9	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	458,319,708	98.67	448,580,858	97.88	9,738,850
39)	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5,870,000	100	5,870,000	100	0

	Kabupaten/Kota					
40)	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,325,000	100	2,325,000	100	0
41)	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	34,986,708	97	34,971,708	97.22	15,000
42)	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	85,000,000	100	83,200,000	100	1,800,000
43)	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	30,372,000	100	29,415,000	99.96	957,000
44)	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	75,000,000	98	73,593,000	97.88	1,407,000
45)	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	19,500,000	97	19,092,000	96.85	408,000
45)	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	20,266,000	98	20,266,000	98.12	0
47)	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	185,000,000	98	179,848,150	97.91	5,151,850
	PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	181,788,000		176,915,340		4,872,660
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	181,788,000	97	176,915,340	97.32	4,872,660
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	181,788,000	97	176,915,340	97.32	4,872,660
48)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44,913,409	98	44,330,500	98.7	582,909
49)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50,000,000	97	48,722,340	97.44	1,277,660
50)	Pengembangan Infrastruktur	36,874,591	96	35,300,000	95.73	1,574,591
51)	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	50,000,000	97	48,562,500	97.12	1,437,500

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	181,788,985		174,844,480		6,944,505
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	181,788,985	95.8	174,844,480	96.18	6,944,505
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170,217,485	95	163,383,480	95.99	6,834,005
52)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24,071,000	92	22,102,550	91.82	1,968,450
53)	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,947,485	98	98,455,430	97.53	2,492,055
54)	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	34,045,000	100	33,080,500	97.17	964,500
55)	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,154,000	90	9,745,000	87.37	1,409,000
12	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	11,571,500	99	11,461,000	99.05	110,500
56)	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,571,500	99	11,461,000	99.05	110,500
	TOTAL	9,943,682,988		9,823,669,648		120,013,340

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi. Alokasi dana dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Alokasi per Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.558.768. 271	62.98%
Meningkatnya implementasi e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.175.578. 000	14.40%
		Program Aplikasi Informatika	1.845.759. 792	14.56%
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	181.788.0 00	0.91%
	Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	181.788.9 85	0.71%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja dalam setahun. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, telah menunjukkan perkembangan ke arah peningkatan pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 100 persen. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 9,823,669,648,- (98.64%) dari total anggaran Rp 9,943,682,988,- Sedangkan capaian target dari IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sudah tercapai semua. Realisasi tersebut selain untuk efisiensi juga telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

Secara akumulasi kinerja telah tercapai dengan baik namun masih terdapat kekurangan / hambatan baik internal maupun eksternal, untuk itu akan kami tingkatkan penyempurnaan kegiatan dan efektifitas anggaran sehingga program pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi Kabupaten Ngawi dimasa mendatang akan lebih baik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ngawi.

Untuk mendukung indikator Kinerja Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu Misi ke - tiga yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Untuk mencapai misi tersebut diatas mengupayakan langkah-langkah di tahun 2023, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dalam memberikan pelayanan publik ;
- Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;

- Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
- Mengimplementasikan e - Government / SPBE
- Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
- Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari uraian tersebut di atas diharapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mampu meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima Kabupaten Ngawi dapat mencapai program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, serta dapat membangun Kabupaten Ngawi untuk kesejahteraan masyarakatnya di masa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Teuku Umar No. 43 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 749050 Fax. (0351) 749050 E-mail : kominfo@ngawikab.go.id

Website : <http://kominfo.ngawikab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU SRI KUNCORO, AP
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H
Jabatan : Bupati Ngawi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian **penghargaan** dan **sanksi**.

Ngawi, 2023

Pihak Kedua,
Bupati Ngawi


ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Ngawi


WAHYU SRI KUNCORO, AP
NIP. 19750122 199403 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20
2.	Meningkatnya implementasi e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80 %
3.	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	60 %
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	300

PROGRAM :

Jumlah Anggaran	Rp.	
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten ?Kota	Rp.	9.746.199.866
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	9.382.622.881
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	930.578.000
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	1.845.951.000
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	181.788.000
	Rp.	166.865.985

Ngawi, 2023

Pihak Kedua,
Bupati Ngawi

ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

WAHYU SRI KUNCORO, AP
NIP. 19750122 199403 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Teuku Umar No. 43 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 749050 Fax. (0351) 749050 E-mail : kominfo@ngawikab.go.id

Website : <https://kominfo.ngawikab.go.id/>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.20
2.	Meningkatnya implementasi e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80 %
3.	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	60 %
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	300

Ngawi, 2023

Pihak Kedua,
Bupati Ngawi

ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

WAHYU SRI KUNCORO, AP
NIP. 19750122 199403 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023
S/D BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN								99,32	
2.16 2.16.3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun				100,00		100,00	100	
2.16 2.16.3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu				100		100	100	
2.16 2.16.3 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	100	11	100	100
2.16 2.16.3 1.2.01.2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.16 2.16.3 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.16 2.16.3 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2	100	2	100	100	
2.16 2.16.3 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	100	2	100	100	
2.16 2.16.3 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	100	7	100	100
2.16 2.16.3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu				100		100	100	
2.16 2.16.3 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26	Dokumen	26	100	26	100	100 Pengajuan TPP menunggu PERBUP TPP, ...
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1430	Orang/Bulan	1430	100	1430	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun				100		100	100	
2.16.2.16.3.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	3	100	3	100	100	
2.16.2.16.3.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	10	100	10	100	100	Menunggu perubahan anggaran karena harga tidak sesuai dengan P3DN (September), Menunggu perubahan anggaran karena harga tidak sesuai dengan P3DN (Agustus), Proses e Purchasing (Nopember),
2.16.2.16.3.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	8	100	8	100	100
2.16.2.16.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun				100		100	100	
2.16.2.16.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.16.2.16.3.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	48	100	48	100	100
2.16.2.16.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.16.2.16.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun				100		100	100	
2.16.2.16.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100	1	100	100
2.16.2.16.3.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	100	4	100	100
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16	Kali	16	100	16	100	100	
2.16.2.16.3.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	36	100	36	100	100
2.16.2.16.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100	1	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi				100,00		97,83	97,83	
2.16.2.16.3.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				100		97,83	97,83	
2.16.2.16.3.2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	55	aduan	55	100	55	100	100	,,,,, Adanya mutasi beberapa Camat dan Hari Jadi Ngawi (Juli),,,,,,
		Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPORI Di tingkat desa dan Kecamatan	100	orang	100	100	100	100	100	
		Jumlah peserta monev admin SP4N-LAPORI	50	Orang	50	100	50	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	2	laporan	2	100	2	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
		Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	1	Kali	1	100	1	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	10	konten	10	100	10	100	100	Dilaksanakan bulan Juli 2023 (Juni),
		Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50	orang	50	100	50	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6	komunitas	6	100	6	100	100
		Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5	kali	5	100	5	100	100	
		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10	media	10	100	10	100	100	
		Jumlah peralatan studio yang diadakan	4	unit	4	100	4	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4	daftar	4	100	4	100	100
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4	daftar	4	100	4	100	100	
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4	daftar	4	100	4	100	100	
		Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa	100	orang	100	100	100	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	8	laporan	8	100	8	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10	laporan	10	100	10	100	100	
		Jumlah Layanan Hubungan Media	10	Layanan	10	100	10	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis penda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	4	kegiatan	4	100	4	100	100, menunggu PAPBD (September),
		Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150	orang	150	100	150	100	100	
		Jumlah koordinasi terkait dengan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12	Laporan	12	100	12	100	100	
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.2.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1	Dokumen	1	100	1	100	100	menunggu PAPBD (September), Kegiatan dilaksanakan di bulan Desember,
		Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120	orang	120	100	120	100	100	
		Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4	media komunikasi	4	100	4	100	100	
		Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4	laporan	4	100	4	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	25	iklan	25	100	25	100	100	,,, menunggu PAPBD (September),,,,,
		Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	100	orang	100	100	100	100	100	
		Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	10	unit	10	100	10	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	100	Orang	100	100	100	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
		Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	2	laporan	2	100	2	100	100	
2.16.2.16.3.2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitra Komunitas	Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5	media	5	100	5	100	100	Anggaran sarana dan prasarana jurnalistik dialihkan (Desember),,,,,,, Proses E Purchasing,,,
		Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50	media	50	100	50	100	100	
		Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38	media	38	100	38	100	100	
		Jumlah peserta Bimtek jurnalistik	100	orang	100	100	100	100	100	
		Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	3	unit	3	100	0	0	0	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	50	laporan	50	100	50	100	100	
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan e - government yang terintegrasi				100,00		100,00	100	
2.16.2.16.3.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				100		100	100	
2.16.2.16.3.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	45	kegiatan	45	100	45	100	100
		Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	3	100	3	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46	OPD	46	100	46	100	100
		Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46	OPD	46	100	46	100	100	
		Besaran bandwidth yang disediakan	1	giga	1	100	1	100	100	
		Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53	kali	53	100	53	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10	laporan	10	100	10	100	100	
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27	Unit	27	100	27	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				100		100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	100	2	100	100
		Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3,2	indeks	3,2	100	3,2	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6	laporan	6	100	6	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	14	aspek	14	100	14	100	100
		Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE	6	laporan	6	100	6	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7	OPD	7	100	7	100	100
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	1	100	1	100	100	
		Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7	OPD	7	100	7	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5	laporan	5	100	5	100	100	
		Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan	1	Unit	1	100	1	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22	jenis data	22	100	22	100	100
		Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4	sistem elektronik	4	100	4	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46	OPD	46	100	46	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13	OPD	13	100	13	100	100
		Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22	sistem	22	100	22	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	4	laporan	4	100	4	100	100	
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22	Unit	22	100	22	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4	aplikasi	4	100	4	100	100
		Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9	layanan	9	100	9	100	100	
		Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14	layanan	14	100	14	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	3	laporan	3	100	3	100	100	
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9	Layanan	9	100	9	100	100	
2.16.2.16.3.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2	capaian	2	100	2	100	100
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6	laporan	6	100	6	100	100	
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.2.16.3.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	15 200 200 3 1	orang orang orang laporan Dokumen	15 200 200 3 1	100 100 100 100 100	15 200 200 3 1	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100 Kegiatan baru akan dilaksanakan bulan Juli 2023 (Mei 2023),
2.16.2.16.3.3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 4 1	kali laporan Dokumen	4 4 1	100 100 100	4 4 1	100 100 100	100 100 100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.20.2.16.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100,00		100,00	100	
2.20.2.16.3.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral				100		100	100	
2.20.2.16.3.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	1	100	1	100	100
		Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	laporan	1	100	1	100	100	
2.20.2.16.3.2.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	27	Orang	27	100	27	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	1	laporan	1	100	1	100	100	
2.20.2.16.3.2.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5	Unit	5	100	5	100	100	
2.20.2.16.3.2.2.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Dokumen	1	100	1	100	100
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	1	laporan	1	100	1	100	100	
2.21.2.16.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				100,00		100,00	100	
2.21.2.16.3.2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard				100		100	100	
2.21.2.16.3.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	2	100	2	100	100	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.21 2.16.3 2.2.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100	1	100	100	Pergeseran jadwal pelaksanaan sosialisasi dibulan Juni 2023 (Mei 2023),
		Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	30	Orang	30	100	30	100	100	
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3	Orang	3	100	3	100	100	
		Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	2	100	2	100	100	
2.21 2.16.3 2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	1	100	1	100	100	, Kegiatan terlaksana bulan Desember (Nopember), Pergeseran di PAPBD (September),,,,,,,,,
		Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100	1	100	100	
		Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	1	Layanan	1	100	1	100	100	
2.21 2.16.3 2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	6	PD	6	100	6	100	100	Kegiatan terlaksana di bulan Desember, Pergeseran di PAPBD (September), Belum terlaksana (Agustus),
		Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	1	Layanan	1	100	1	100	100	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintahan Daerah	1	CSIRT	1	100	1	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4	Laporan	4	100	4	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.21 2.16.3 2 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				100		100	100	
2.21 2.16.3 2 2.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	3	PD	3	100	3	100	100
		Jumlah Layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Layanan	1	100	1	100	100	
		Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	2	100	2	100	100	
		Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	4	100	4	100	100	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI



**LAPORAN EVALUASI KERJA PROGRAM / KEGIATAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023
S/D BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN				FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA	
					T		R		K	T	R				K
					Rp	%	Rp	%							
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*10	16
2.16.3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	9.943.682.988	0,0039	0,39	9.943.682.988	100	9.808.062.064	98,64	0,1926	100	98,21	0,19177	0,38437	98,43	
2.16.2.16.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.558.768.271	0,6596	65,96	6.558.768.271	100	6.495.835.077	99,04	32,66297	100	99,42	32,78829	65,45126	99,23	
2.16.2.16.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.928.000	0,0038	0,38	24.928.000	100	24.928.000	100	0,19004	100	100	0,19004	0,38008	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.080.000	0,1637	16,37	4.080.000	100	4.080.000	100	8,18357	100	100	8,18357	16,36714	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.215.000	0,0487	4,87	1.215.000	100	1.215.000	100	2,43702	100	100	2,43702	4,87404	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1.215.000	0,0487	4,87	1.215.000	100	1.215.000	100	2,43702	100	100	2,43702	4,87404	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	4.705.000	0,1887	18,87	4.705.000	100	4.705.000	100	9,43718	100	100	9,43718	18,87436	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.705.000	0,1887	18,87	4.705.000	100	4.705.000	100	9,43718	100	100	9,43718	18,87436	100	
2.16.2.16.3.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.008.000	0,3614	36,14	9.008.000	100	9.008.000	100	18,06804	100	100	18,06804	36,13608	100	
2.16.2.16.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.715.912.671	0,8715	87,15	5.715.912.671	100	5.670.804.166	99,21	43,23035	100	99,67	43,43079	86,66114	99,44	
2.16.2.16.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.703.697.671	0,9979	99,79	5.703.697.671	100	5.658.589.166	99,21	49,49899	100	99	49,39422	98,89321	99,1	
2.16.2.16.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.110.000	0,0009	0,09	5.110.000	100	5.110.000	100	0,0447	100	100	0,0447	0,0894	100	
2.16.2.16.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.105.000	0,0012	0,12	7.105.000	100	7.105.000	100	0,06215	100	100	0,06215	0,1243	100	
2.16.2.16.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.558.606	0,0255	2,56	167.558.606	100	165.403.170	98,71	1,26089	100	99,86	1,27558	2,53647	99,29	
2.16.2.16.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.740.592	0,0283	2,83	4.740.592	100	4.740.000	99,99	1,41447	100	100	1,41461	2,82908	100	
2.16.2.16.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.761.736	0,3567	35,67	59.761.736	100	59.185.000	99,03	17,6601	100	100	17,83308	35,49318	99,51	
2.16.2.16.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.140.000	0,0187	1,87	3.140.000	100	3.140.000	100	0,93699	100	100	0,93699	1,87398	100	
2.16.2.16.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.971.000	0,0893	8,94	14.971.000	100	14.971.000	100	4,46739	100	100	4,46739	8,93478	100	
2.16.2.16.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	0,0118	1,18	1.980.000	100	1.980.000	100	0,59084	100	100	0,59084	1,18168	100	
2.16.2.16.3.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.650.000	0,0158	1,58	2.650.000	100	2.650.000	100	0,79077	100	100	0,79077	1,58154	100	
2.16.2.16.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.315.278	0,4793	47,93	80.315.278	100	78.737.170	98,04	23,49658	100	99	23,72666	47,22324	98,52	
2.16.2.16.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.337.846	0,0304	3,04	199.337.846	100	187.845.000	94,23	1,43195	100	98,67	1,49942	2,93137	96,45	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN				FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA	
					T		R		K	T	R				K
					Rp	%	Rp	%							
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*10	16
2.16 2.16.3 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.106.000	0,5825	58,25	116.106.000	100	107.400.000	92,5	26,9387	100	100	29,12292	56,06162	96,25	
2.16 2.16.3 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	15.813.000	0,0793	7,93	15.813.000	100	15.765.000	99,7	3,95448	100	100	3,96638	7,92086	99,85	
2.16 2.16.3 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.418.846	0,3382	33,82	67.418.846	100	64.680.000	95,94	16,22412	100	96	16,23427	32,45839	95,97	
2.16 2.16.3 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.011.148	0,0581	5,81	381.011.148	100	379.931.141	99,72	2,89646	100	100	2,90459	5,80105	99,86	
2.16 2.16.3 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.216.148	0,6173	61,74	235.216.148	100	234.139.641	99,54	30,72537	100	100	30,86736	61,59273	99,77	
2.16 2.16.3 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.800.000	0,1701	17,01	64.800.000	100	64.800.000	100	8,50369	100	100	8,50369	17,00738	100	
2.16 2.16.3 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.995.000	0,2126	21,26	80.995.000	100	80.991.500	100	10,62895	100	100	10,62895	21,2579	100	
2.16 2.16.3 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.020.000	0,0107	1,07	70.020.000	100	66.923.600	95,58	0,5102	100	97,75	0,52178	1,03198	96,67	
2.16 2.16.3 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000	0,1714	17,14	12.000.000	100	11.517.000	95,98	8,22451	100	100	8,56898	16,79349	97,99	
2.16 2.16.3 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.500.000	0,3785	37,85	26.500.000	100	23.886.600	90,14	17,05734	100	91	17,22008	34,27742	90,57	
2.16 2.16.3 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000	0,3073	30,73	21.520.000	100	21.520.000	100	15,36704	100	100	15,36704	30,73408	100	
2.16 2.16.3 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	0,1428	14,28	10.000.000	100	10.000.000	100	7,14082	100	100	7,14082	14,28164	100	
2.16 2.16.3 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.175.578.000	0,1182	11,82	1.175.578.000	100	1.132.035.584	96,3	5,69247	100	96,1	5,68064	11,37311	96,2	
2.16 2.16.3 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.175.578.000	1	100	1.175.578.000	100	1.132.035.584	96,3	48,15	100	96,1	48,05	96,2	96,2	
2.16 2.16.3 2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	171.010.000	0,1455	14,55	171.010.000	100	164.447.100	96,16	6,99414	100	96	6,98251	13,97665	96,08	
2.16 2.16.3 2.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.816.000	0,0024	0,24	2.816.000	100	2.420.000	85,94	0,10293	100	90	0,10779	0,21072	87,97	
2.16 2.16.3 2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	465.501.000	0,396	39,6	465.501.000	100	460.765.500	98,98	19,59687	100	99	19,60083	39,1977	98,99	
2.16 2.16.3 2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13.880.000	0,0118	1,18	13.880.000	100	13.610.600	98,06	0,5789	100	98	0,57854	1,15744	98,03	
2.16 2.16.3 2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20.248.000	0,0172	1,72	20.248.000	100	20.202.000	99,77	0,85921	100	100	0,86119	1,7204	99,88	
2.16 2.16.3 2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	212.432.000	0,1807	18,07	212.432.000	100	204.965.334	96,49	8,71808	100	97	8,76416	17,48224	96,75	
2.16 2.16.3 2.2.01.6	Layanan Informasi Publik	45.082.000	0,0383	3,84	45.082.000	100	43.907.580	97,39	1,86739	100	97	1,85992	3,72731	97,19	
2.16 2.16.3 2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	75.000.000	0,0638	6,38	75.000.000	100	73.555.260	98,07	3,12835	100	98	3,12612	6,25447	98,03	
2.16 2.16.3 2.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	161.160.000	0,1371	13,71	161.160.000	100	140.381.210	87,11	5,97096	100	94	6,44323	12,41419	90,56	
2.16 2.16.3 2.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	8.449.000	0,0072	0,72	8.449.000	100	7.781.000	92,09	0,33093	100	92	0,33061	0,66154	92,05	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN						FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA	
					T			R			K	T	R				K
					Rp	%	Rp	%	Rp	%							
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*10	16		
2.16.2.16.3.3.2.01.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.845.759.732	0,1856	18,56	1.845.759.732	100	1.828.431.583	99,06	9,19382	100	98,82	9,17155	18,36537	98,94			
2.16.2.16.3.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.387.440.024	0,7517	75,17	1.387.440.024	100	1.379.850.725	99,45	37,37781	100	99,5	37,3966	74,77441	99,47			
2.16.2.16.3.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.125.000	0,0116	1,16	16.125.000	100	16.108.875	99,9	0,58053	100	100	0,58111	1,16164	99,95			
2.16.2.16.3.3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.371.315.024	0,9884	98,84	1.371.315.024	100	1.363.741.850	99,45	49,14709	100	99	48,9247	98,07179	99,22			
2.16.2.16.3.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	458.319.708	0,2483	24,83	458.319.708	100	448.580.858	97,88	12,15227	100	98,67	12,25035	24,40262	98,28			
2.16.2.16.3.3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.870.000	0,0128	1,28	5.870.000	100	5.870.000	100	0,64038	100	100	0,64038	1,28076	100			
2.16.2.16.3.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	20.266.000	0,0442	4,42	20.266.000	100	20.266.000	100	2,2109	100	100	2,2109	4,4218	100			
2.16.2.16.3.3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	185.000.000	0,4036	40,37	185.000.000	100	179.848.150	97,22	19,62135	100	97	19,57695	39,1983	97,11			
2.16.2.16.3.3.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.325.000	0,0051	0,51	2.325.000	100	2.325.000	100	0,25364	100	100	0,25364	0,50728	100			
2.16.2.16.3.3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	34.986.708	0,0763	7,63	34.986.708	100	34.971.708	99,96	3,81532	100	100	3,81685	7,63217	99,98			
2.16.2.16.3.3.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	85.000.000	0,1855	18,55	85.000.000	100	83.200.000	97,88	9,07642	100	98	9,08754	18,16396	97,94			
2.16.2.16.3.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.372.000	0,0663	6,63	30.372.000	100	29.415.000	96,85	3,20904	100	97	3,21401	6,42305	96,93			
2.16.2.16.3.3.2.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	75.000.000	0,1636	16,36	75.000.000	100	73.593.000	98,12	8,02824	100	98	8,01842	16,04666	98,06			
2.16.2.16.3.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	19.500.000	0,0425	4,26	19.500.000	100	19.092.000	97,91	2,08287	100	98	2,08479	4,16766	97,95			
2.20.2.16.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	181.788.000	0,0183	1,83	181.788.000	100	176.915.340	97,32	0,88959	100	97	0,88667	1,77626	97,17			
2.20.2.16.3.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	181.788.000	1	100	181.788.000	100	176.915.340	97,32	48,66	100	97	48,5	97,16	97,16			
2.20.2.16.3.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44.913.409	0,2471	24,71	44.913.409	100	44.330.500	98,7	12,19265	100	98	12,10617	24,29882	98,35			
2.20.2.16.3.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50.000.000	0,275	27,51	50.000.000	100	48.722.340	97,44	13,40022	100	97	13,33971	26,73993	97,22			
2.20.2.16.3.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	36.874.591	0,2028	20,28	36.874.591	100	35.300.000	95,73	9,70912	100	96	9,73651	19,44563	95,86			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN						FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA
					T		R		K		T	R	K			
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	%	%	%			
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*10	16	
2.20 2.16.3 2.2.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	50.000.000	0,275	27,51	50.000.000	100	48.562.500	97,12	13.35622	100	97	13.33971	26.69593	97,06		
2.21 2.16.3 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	181.788.985	0,0183	1,83	181.788.985	100	174.844.480	96,18	0,87917	100	95,8	0,8757	1,75487	96		
2.21 2.16.3 2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.217.485	0,9363	93,64	170.217.485	100	163.383.480	95,99	44,93995	100	95	44,47646	89,41641	95,49		
2.21 2.16.3 2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	24.071.000	0,1414	14,14	24.071.000	100	22.102.550	91,82	6,49228	100	92	6,50501	12,99729	91,91		
2.21 2.16.3 2.2.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100.947.485	0,5931	59,31	100.947.485	100	98.455.430	97,53	28,92008	100	98	29,05945	57,97953	97,76		
2.21 2.16.3 2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	34.045.000	0,2	20	34.045.000	100	33.080.500	97,17	9,71743	100	100	10,00044	19,71787	98,58		
2.21 2.16.3 2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	11.154.000	0,0655	6,55	11.154.000	100	9.745.000	87,37	2,86259	100	90	2,94876	5,81135	88,69		
2.21 2.16.3 2.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota	11.571.500	0,0637	6,37	11.571.500	100	11.461.000	99,05	3,15244	100	99	3,15085	6,30329	99,03		
2.21 2.16.3 2.2.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	11.571.500	1	100	11.571.500	100	11.461.000	99,05	49,525	100	99	49,5	99,025	99,02		

